

Date: 07 Mar 2020

Hal-1

Dear B.S,

Apa kabar diluar sana Mbang? ... semoga baik² dan semoga juga bisa membantu saya terutama ttg kebutuhan saksi dan menyebarkan info kasus yg sebenarnya. Saya dituntut bekerjasama dg Bakamla dlm hal menya- sun spek dan harga (HPS) dan KPK hanya menghitung bukti² pembayaran kepihak ke-3 utk barang² jadi, barang setengah jadi dan komponen. KPK mengaba- kan bar nilai barang² jadi buatn CMI B. yg jum- lahnya 44 M, serta mengabaikan biaya² services seperti biaya pengiriman barang, instalasi, uji terima, engineering, maintenance dan suku cadang serta mana- gement project.

Peristiwanya begini :

→ Mulanya saya diajak/diminta ~~oleh~~ oleh seseorang¹ yg mengaku sbg staf ahli Bappenas utk membantu membesarkan Bakamla, ... awalnya saya datang sendiri, 1 minggu kemudian^{saya} datang lagi^{dan} dgn engineer CMI utk berdiskusi dgn team B'mla ... proses ini berlanjut dan saling berkirim e-mail CMI- B'mla dan akhirnya B'mla melalui e-mail meminta penawaran harga utk mereka pakai sebagai referensi (HPS) dan saya jawab secara resmi juga. Saya memberi penawaran ke B'mla pada harga tertentu utk beberapa item barang. Angka saya oleh B'mla dipakai sebagai HPS tender namun isi perangkat yg ditender- kan berbeda dg yg saya tawarkan.

Date: 07 Mar 2020

Hal - 2

⇒ Disisi lain rencana pengadaan di Bimla yg dimulai dari pengadaan Backbone telekomunikasi berkembang ada beberapa tambahan seperti podcast, dashboard dan keinginan utk mengoperasikan radio GMDSS mereka secara "Roip". Bakamla juga sudah memiliki data center dan ternyata sebagian data center tsb berada di PSN berikut data processingnya.

Bimla juga sudah memiliki Bimla Integrated Information System (BIIS). Nah rencananya pengadaan perangkat² baru tsb utk diintegrasikan dg BIIS... yg ternyata BIIS tsb sebagian programnya milik PSN dan akan dihentikan sewanya.

Selanjutnya pengadaan Backbone menjadi berubah ke pengadaan barang² utk "PUSKODAL" yg tentunya di set-up menjadi Puskodal yg selanjutnya menggantikan BIIS bukan terintegrasi dgn BIIS. Puskodal baru tsb adalah Integrated Monitoring Command and Control System (IMC₂-S) yg sudah lengkap dgn Backbone-nya (lihat brosur IMC₂-system).

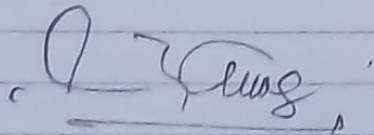
Karena peristiwanya demikian maka dlm pekerjaan ini sarat pekerjaan engineering. Masalahnya KPK melihat kontrak hanya judulnya bukan isinya, bahkan proyek² CMI dinilai "not rupiah" makanya timbul "mark-up" apa KPK sebodoh itu ?? ... atau ada pesanan?

Utk jelasnya tolong Bambang bisa diskusi sama Nyoman termasuk perhitungan

untung rugi yg sudah saya buat tabelnya.
Tolong informasi ini bisa di share dengan
Rhiza yg sudah bersedia jadi saksi ahli yg
meringankan.

Utk sementara ini sekian dulu dari saya
thank's lot atas segala bantuannya.

Salam,



Porto

NB:

IMC2-system adalah C3ISR atau K3I yg dirancang
memiliki MTTR-99,8%, jadi harus ada anggaran
untuk suku cadang dan anggaran maintenance
Malah ini KPK nggak ngerti atau pura-pura tidak
ngerti.